

***JOINT DEVELOPMENT PROJECT KFX/IFX INDONESIA-KOREA SELATAN
DALAM PEMENUHAN KEBIJAKAN *MINIMUM ESSENTIAL FORCE****

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun oleh:

CINDY VIONITA ARITONANG

07041281823134

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2022

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**“JOINT DEVELOPMENT PROJECT KFX/IFX INDONESIA-KOREA
SELATAN DALAM PEMENUHAN KEBIJAKAN *MINIMUM
ESSENTIAL FORCE*”**

Skripsi

Oleh :

Cindy Vionita Aritonang

07041281823134

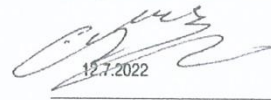
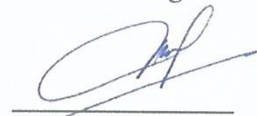
**Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 24 Mei 2022**

Pembimbing :

1. Drs. Djunaidi, MSLS
NIP. 196203021988031004

2. Muhammad Yusuf Abror, S.IP., MA
NIP. 199208272019031005

Tanda Tangan



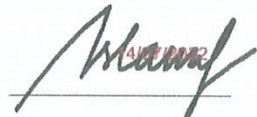
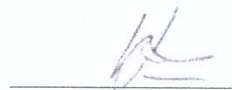
12.7.2022

Penguji :

1. Dra. Retno Susilowati, MM
NIP. 195905201985032003

2. Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc
NIP. 199012062019032017

Tanda Tangan



Mengetahui,



HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI
JOINT DEVELOPMENT PROJECT KFX/IFX ANTARA INDONESIA-KOREA
SELATAN DALAM PEMENUHAN KEBIJAKAN *MINIMUM ESSENTIAL FORCE*

SKRIPSI

Disusun oleh:

CINDY VIONITA ARITONANG
07041281823134

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing,

Pembimbing 1

Drs. Djunaidi, MSLS
NIP. 196203021988031004



Pembimbing II

Muhammad Yusuf Abror, S.I.P., M.A
NIP. 199208272019031005



Disetujui oleh,
Kepala Program Studi

Sofyan Effendi, S.I.P., M.Si.
NIP. 197705122003121003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cindy Vionita Aritonang

NIM : 07041281722063

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "*Joint Development Project KFX/IFX Antara Indonesia-Korea Selatan dalam Pemenuhan Kebijakan Minimum Essential Force*" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, 10 Mei 2022

Yang membuat pernyataan



Cindy Vionita Aritonang
NIM. 07041281823134

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, karena oleh kasih yang berkelimpahan dan izin-Nya telah memberikan saya kesempatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Joint Development Project KFX/IFX Dalam Pemenuhan Kebijakan Minimum Essential Force”**. Penyelesaian skripsi menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti ujian komprehensif di Universitas Sriwijaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.

Dalam menjalani proses penyusunan skripsi, saya mendapatkan dukungan dan bantuan yang berkelimpahan dalam berbagai bentuk. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini; dimulai dari kedua orang tua saya yang tercinta, adik-adik saya, kedua dosen pembimbing yang telah membantu saya sejak awal penulisan skripsi, hingga saudara dan teman-teman yang saya sayangi.

Saya telah menulis skripsi ini dengan semaksimal mungkin, namun saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Terdapat kekurangan dan kesalahan yang mungkin masih saya lakukan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, saya sangat terbuka akan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca skripsi ini, guna menjadi evaluasi serta memperluas pandangan saya terhadap isu yang dibahas dalam skripsi ini. Saya harap skripsi ini dapat membantu pembaca dalam memahami lebih lanjut mengenai kerjasama pesawat tempur KFX/IFX yang dilakukan Indonesia dan Korea Selatan, dalam pemenuhan kebijakan Minimum Essential Force.

Palembang, 23 Mei 2022



Cindy Vionita Aritonang

NIM. 07041281823134

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas seluruh berkat dan kasih-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan bagi saya untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga bagi seluruh pihak yang ikut berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

1. Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menjadi sumber kekuatan dan pedoman hidupan saya, yang telah memberikan berkat dan kasih yang tak berkesudahan, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “*Joint Development Project KFX/IFX Dalam Pemenuhan Kebijakan Minimum Essential Force*”;
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. H. Azhar, SH.,M.Sc., LL.M., selaku Wakil Dekan I Bidang Kependidikan Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd., selaku Wakil Dekan II dalam Bidang Keuangan dan Kepegawaian Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Andries Lionardo, M.Si., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan;
6. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional;
7. Bapak Drs. Djunaidi, MSLS, selaku Dosen Pembimbing Utama yang sejak awal proses penulisan skripsi telah meluangkan waktu dalam memberikan saran dan arahan;
8. Bapak M. Yusuf Abror S.IP., M.A, selaku Dosen Pembimbing Kedua yang selalu memberikan saran dan arahan kepada saya hingga akhir penulisan skripsi;
9. Ibu Dra. Retno Susilowati, MM, selaku Dosen Penguji yang telah memberikan bimbingan dan arahan terkait penulisan skripsi saya;
10. Ibu Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc, selaku Dosen Penguji yang telah senantiasa memberikan masukan dan arahan dalam penulisan skripsi saya;
11. Bapak Gunawan Lestari Elake, S.IP., M.A, selaku Dosen Pembimbing Akademik saya;

12. Seluruh dosen dan tenaga pengajar yang terdapat di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang tiada hentinya memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan untuk saya sejak awal saya menjadi mahasiswa di Universitas Sriwijaya;
13. Seluruh staf administrasi dan staf yang terdapat di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang senantiasa membantu melancarkan proses penulisan skripsi saya;
14. Kepada kedua orang tua saya, Rensius Aritonang dan Marshinta Simanjuntak, atas kasih sayang dan dukungan, serta menjadi motivasi serta sumber semangat saya dalam penulisan skripsi saya;
15. Kepada ketiga saudara saya, Cathrine, Cecilia, dan Rafael yang selalu memberikan dukungan untuk saya;
16. Kepada rekan yang telah menemani saya sejak masa SMA, Riss Daniel Mikhael, atas kasih, semangat, dan dukungan yang telah diberikan kepada saya;
17. Kepada seluruh sahabat saya, Tamiko, Wellsun, Kak Reeza, Kak Siska, Ave, Felicia, Qadja, dan seluruh sahabat saya yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang telah menemani saya dan memberikan banyak dukungan untuk saya;
18. Kepada Bapak Dian, S.H., dari Kedepatian II Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selaku pembimbing teknis selama saya melaksanakan kegiatan magang hingga membantu dalam pelengkapan data skripsi;
19. Seluruh pihak lain yang terlibat sejak awal proses perkuliahan hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Palembang, 23 Mei 2022



Cindy Vionita Aritonang
NIM. 07041281823134

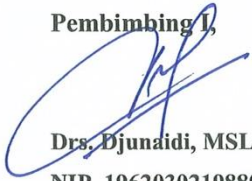
ABSTRAK

Ketidakpastian yang dihasilkan oleh sistem internasional yang anarki mendorong setiap negara di dunia untuk terus meningkatkan kemampuan mereka dalam berbagai bidang. Keamanan menjadi tujuan utama setiap negara di dunia, menciptakan kondisi yang menyejahterakan serta menjauhkan berbagai ancaman dari masyarakatnya. Indonesia, sebagai salah satu negara yang berdaulat, terus mengupayakan keamanan negaranya dengan berbagai cara, salah satunya adalah proyek kolaborasi pesawat jet tempur KFX/IFX yang melibatkan Korea Selatan sebagai mitra kerjasamanya. Penelitian ini akan dikaji dalam perspektif neorealisme, serta konsep kerjasama pertahanan oleh Kenneth Waltz yang memandang negara sebagai aktor utama rasional dengan berbagai kecurigaan, sehingga membatasi kerjasama yang dilakukan dalam bidang militer atau keamanan dan dalam jangka waktu tertentu. Dengan pendekatan kualitatif serta menggunakan teknik *triangulation research* penelitian ini menyimpulkan hasil bahwa Indonesia dan Korea Selatan telah berupaya mencapai tujuan serta kepentingan nasional mereka dalam *Joint Development Project KFX/IFX*, serta memberikan dampak positif terhadap Kebijakan Penyelesaian *Minimum Essential Force* Indonesia dalam meningkatkan kualitas serta kuantitas Tentara Nasional Indonesia sebagai garda keamanan negara.

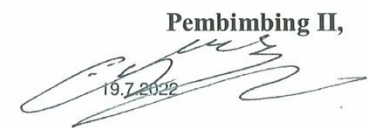
Kata kunci: Indonesia, Korea Selatan, *Joint Development Project KFX/IFX*

Mengetahui

Pembimbing I,


Drs. Djunaidi, MSLS
NIP. 196203021988031004

Pembimbing II,


19.7.2022
Muhammad Yusuf Abror, S.I.P., M.A
NIP. 199208272019031005

Disetujui Oleh,
Kepala Jurusan



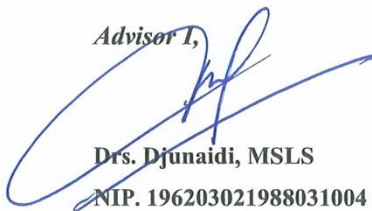
ABSTRACT

The uncertainty generated by the anarchic international system encourages every country in the world to continuously improve their capabilities in various fields. Security is the main goal of every country in the world, creating conditions that are prosperous and keep various threats away from its people. Indonesia, as a sovereign country, continues to strive for the security of its country in various ways, one of them is the KFX/IFX fighter jet collaboration project involving South Korea as a cooperation partner. This research will be examined in the perspective of neorealism, as well as the concept of defense cooperation by Kenneth Waltz who views the state as the main rational actor with various suspicions, thus limiting the cooperation carried out in the military or security sector and within a certain period of time. With a qualitative approach and using triangulation research techniques, this study concludes that Indonesia and South Korea have made efforts to achieve their national goals and interests in the KFX/IFX Joint Development Project, and have had a positive impact on Indonesia's Minimum Essential Force Alignment Policy in improving the quality and quantity of the Indonesian National Army as the national security guard.


Keywords: Indonesia, South Korea, KFX/IFX Joint Development Project.

Acknowledged by,

Advisor I,


Drs. Djunaidi, MSLS
NIP. 196203021988031004

Advisor II,


Muhammad Yusuf Abror, S.I.P., M.A
NIP. 199208272019031005

Approved by,

Head of Department



DAFTAR ISI

<i>BAB I PENDAHULUAN</i>	15
1.1 Latar Belakang	15
1.2 Rumusan Masalah	21
1.3 Tujuan Penelitian	21
1.4 Manfaat Penelitian	21
<i>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</i>	23
2.1 Penelitian Terdahulu	23
2.2 Landasan Teori	32
2.3 Landasan Konseptual	36
2.4 Alur Berpikir	39
<i>BAB III METODE PENELITIAN</i>	41
3.1 Desain Penelitian	41
3.2 Definisi Konsep	42
3.2.1. Joint Development	42
3.2.2. KFX/IFX	42
3.2.3. Minimum Essential Force	43
3.3 Fokus Penelitian	44
3.4 Unit Analisis	45
3.5 Jenis dan Sumber Data	46
3.6 Teknik Pengumpulan Data	46
3.7 Teknik Keabsahan Data	47
3.8 Teknik Analisa Data	47

<i>BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN</i>	48
4. 1. Sektor Militer Indonesia	48
4. 2. Joint Development Project KFX/IFX	49
4.3. Kebijakan Penyelarasan <i>Minimum Essential Force</i>	56
<i>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN</i>	59
5.1. Teknologi Pesawat Tempur	61
5.2. Rekayasa dan Manufaktur	72
5. 3. Tenaga Ahli Pesawat Tempur	75
5.4. Tenaga Ahli Strategic Planning	81
<i>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN</i>	88
6.1. Kesimpulan	88
6.2. Saran	90
<i>DAFTAR PUSTAKA</i>	91

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1. Tabel Penelitian Terdahulu	23
Tabel 2.4.1. Alur Berpikir	39
Tabel 3.3.1. Tabel Fokus Penelitian.....	44
Tabel 4.2.1. Perbandingan <i>Military Combat Aircraft</i> , <i>Total Military Aircraft</i> , dan jumlah populasi dari Indonesia, Singapura, Vietnam, Myanmar, dan Filipina pada tahun 2014	51
Tabel 4.2.2. Timeline Perencanaan <i>Joint Development Project</i> pesawat jet tempur KFX/IFX (Sari, 2021)	53
Tabel 4.3.1. Susunan periode dalam pelaksanaan kebijakan penyesuaian <i>Minimum Essential Force</i>	58
Tabel 5.1.1. Spesifikasi Umum Pesawat F-35 Lightning II	66

DAFTAR SINGKATAN

AESA	: <i>Active Electronically Scanned Array</i>
Alutsista	: Alat Utama Sistem Persenjataan
ASEAN	: <i>Association of South East Asian Nations</i>
BPIS	: Bahana Pakarya Industri Strategis
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CTOL	: <i>Conventional Takeoff and Landing</i>
DAPA	: <i>Defense Acquisition Program Administration</i>
DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DSME	: <i>Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering</i>
DTSS	: <i>Defense Technology Security System</i>
FASS	: <i>Fuselage Automated Splice System</i>
GaN	: Gallium Nitrida
HAM	: Hak Asasi Manusia
IFX	: <i>Indonesia Fighter Experiment</i>
ITCs	: <i>Industrial Technological Capabilities</i>
KAI	: <i>Korea Aerospace Industries, Ltd</i>
KFX	: <i>Korea Fighter Experiment</i>
LoI	: <i>Letter of Intent</i>
MEF	: Minimum Essential Force
MIC	: <i>Military Industrial Complex</i>
MMR	: <i>Mixed Methods Research</i>
MNC	: <i>Multi-National Corporations</i>
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
PDB	: Produk Domestik Bruto
PTDI	: Perseroan Terbatas Dirgantara Indonesia
PT. IPTN	: Perseroan Terbatas Industri Pesawat Terbang Nusantara
PT. PAL	: Perseroan Terbatas Penataran Angkatan Laut
PT. Pindad	: Perseroan Terbatas Perindustrian TNI Angkatan Darat

Renstra	: Rencana Strategi
RoKAF	: <i>Republic of Korea Air Force</i>
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SWOT	: <i>Strength, Weakness, Opportunities, Threats</i>
TAA	: <i>Technical Assistance Agreement</i>
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TNI AD	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
TNI AL	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
TNI AU	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara sebagai aktor utama dalam menciptakan keamanan yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya melalui penyediaan ekonomi, pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, hukum, ketertiban, pekerjaan, dan infrastruktur. Dengan demikian, negara tetap mempertahankan peran utamanya dalam kehidupan ekonomi, politik, sosial dan budaya bagi warga negaranya. Pertahanan nasional merujuk pada semua tindakan dan ketentuan dalam bentuk apa pun yang diadopsi oleh suatu negara, yang objeknya memiliki jaminan, setiap saat, dalam keadaan apa pun dan terhadap segala bentuk agresi, atas keamanan dan integritas wilayahnya, dan juga kehidupan penduduknya (Moştoflei & Duşu, 2004). Keamanan yang diusahakan dan diwujudkan oleh aktor negara disebut keamanan negara.

Keamanan negara sangat terkait dengan kegiatan melindungi wilayah negara dari ancaman militer eksternal, dan juga kegiatan menjaga sistem politik yang berlaku. Sejumlah besar sumber daya negara diarahkan untuk mempertahankan angkatan bersenjata yang efektif, berprinsip anti-terorisme, sigap dengan kondisi darurat, memanfaatkan badan intelijen untuk mendeteksi dan melawan berbagai serangan, menggunakan diplomasi untuk meningkatkan aliansi dan menggunakan kekuatan ekonomi dengan tujuan mendorong kerjasama.

Keamanan negara berpusat pada integritas teritorial, stabilitas politik, pengaturan militer dan pertahanan, serta kegiatan ekonomi dan keuangan. Pertahanan keamanan negara dan keamanan manusia harus menjadi tujuan kebijakan nasional dan kerjasama regional maupun

internasional. Keamanan nasional menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan keamanan bagi warga negaranya. Pemerintah terpilih dari negara mana pun memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan sektor keamanan sejalan dengan praktik terbaik dalam mencapai keamanan negara dan penyediaan keamanan sebagai barang publik. Pemerintah juga memikul tanggung jawab politik untuk kegiatan sektor keamanan. Maka dari itu, pemerintah memerlukan rencana dan struktur manajemen yang terperinci dan ekstensif untuk memastikan kebijakan dan praktik keamanan transparan dan akuntabel.

Kemampuan negara untuk melindungi diri dari berbagai bahaya dan berbagai ancaman eksternal juga menjadi definisi dari keamanan negara. Misalnya, intervensi, blokade, invasi, penghancuran, pendudukan, atau gangguan berbahaya lainnya oleh kekuatan asing yang bermusuhan atau kelompok teroris. Dalam teori politik liberal, negara bukan hanya milik rakyat tetapi sebenarnya adalah ciptaan rakyat. Oleh karena itu, dalam hakikatnya, negara tidak dapat menimbulkan ancaman bagi warga negaranya sendiri yang kepentingan pribadinya identik dengan kepentingan negara. Kebijakan keamanan nasional diarahkan untuk menciptakan dan memelihara sektor militer untuk pertahanan dan pencegahan ancaman.

Dalam hakikatnya, negara merupakan suatu model keamanan. Negara memikul tanggung jawab untuk melindungi warganya. Dengan cara ini, keamanan warga negara dari suatu negara terjamin ketika keamanan negara itu sendiri juga terjamin. Dengan melaksanakan pertahanan negara, kepentingan nasional dilindungi oleh keterlibatan aktif lembaga-lembaga negara yang bertanggung jawab di lapangan, tetapi tidak hanya itu, komitmen sumber daya negara yang tersedia untuk menjamin kedaulatan, kemerdekaan, persatuan, integritas teritorial dan demokrasi konstitusional, harus memerangi segala jenis agresi. Indonesia sebagai negara

yang independen dan berdaulat, tentu memiliki tanggungjawab atas keamanan negara serta warga negaranya. Salah satu sumber daya terpenting yang diperlukan untuk mencapai pertahanan negara merupakan sumber daya manusia yang perlu terus menerus dipersiapkan dan dilatih melalui berbagai bentuk persiapan dalam sektor militer.

Salah satu garda terdepan Indonesia dalam tugas menjaga keamanan dan mempertahankan negara adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau sektor militer. Namun, pengembangan angkatan bersenjata Indonesia dianggap masih mengalami ketertinggalan apabila dibandingkan dengan kekuatan angkatan bersenjata dari negara lain, terutama di kawasan Asia Tenggara. Padahal, sudah menjadi asumsi umum bahwa peran angkatan bersenjata, terutama di antara negara-negara demokrasi yang terkonsolidasi, adalah untuk memberikan keamanan terhadap ancaman eksternal, sementara pasukan polisi ditugaskan untuk memberikan keamanan, pengawasan, dan ketertiban internal di dalam perbatasan suatu negara. Kekuatan negara dan militer sudah seharusnya menjadi sama kuatnya, karena keduanya memiliki peran yang sama-sama signifikan dalam upaya mewujudkan keamanan manusia dan keamanan nasional.

Namun, kualitas serta kuantitas sektor militer Indonesia dapat dikatakan mengalami ketertinggalan. Terutama, apabila dibandingkan dengan negara-negara sekitarnya di wilayah ASEAN. Hal ini dapat dilihat dari anggaran militer yang dikeluarkan oleh Indonesia yang dibandingkan dengan jumlah penduduk wilayah Indonesia. Pengeluaran atau anggaran militer adalah jumlah sumber daya keuangan yang dialokasikan oleh suatu negara untuk memelihara angkatan bersenjata dan layanan penting lainnya untuk tujuan pertahanan. Contohnya, anggaran belanja militer negara Indonesia di tahun 2007 adalah sebesar 0.9% dari Produk Domestik Bruto

(PDB) Indonesia di tahun yang sama (420 miliar US Dollar), yaitu sebesar 3,5 miliar US Dollar untuk sektor militer. Apabila dibandingkan dengan anggaran belanja militer negara Singapura pada tahun 2007, Singapura mengeluarkan sebesar 7,6% dari PDB negara (132 miliar US Dollar) atau sebesar 10 miliar US Dollar. Di tahun yang sama, Myanmar mengeluarkan 8,2% dari PDB negara (75 miliar Dollar) untuk sektor militer, yaitu sebesar 6,2 miliar Dollar. Persentase anggaran militer Indonesia menduduki angka terkecil, padahal jumlah penduduk Indonesia menduduki posisi tertinggi di antara kedua negara pembanding.

Apabila dibandingkan dengan negara-negara lain dengan anggaran belanja sektor militer tertinggi pada tahun yang sama, yaitu Amerika Serikat (\$607 miliar US Dollar), China (\$85 miliar US Dollar), Prancis (\$66 miliar US Dollar), Inggris (\$65 miliar US Dollar), dan Rusia (\$59 miliar Dollar), Indonesia memiliki nilai jumlah anggaran sektor militer yang sangat jauh di bawah (Stockholm International Peace Research Institute, 2008). Jumlah atau kuantitas dari alutsista yang dimiliki oleh Indonesia juga dapat dikatakan mengalami ketertinggalan. Dalam angka kepemilikan pesawat tempur (*jet fighters*) dan *military aircrafts*, Singapura tercatat memiliki 119 unit pesawat tempur, Vietnam tercatat memiliki 189 unit pesawat tempur, sementara Indonesia hanya memiliki 69 unit pesawat tempur (Nation Master, 2016)

Padahal, kehadiran sektor militer yang mumpuni sebagai perangkat negara menjadi salah satu alat untuk mewujudkan kepentingan nasional utama dari setiap negara, yaitu memastikan keamanan wilayah negaranya. Ditambah dengan struktur internasional yang anarki, serta hubungan antar negara yang konfliktual, reformasi dalam sektor keamanan yang bertujuan untuk memperbaiki tata kelola negara sangat diperlukan, sehingga mengurangi risiko kelemahan negara atau kegagalan negara dalam memastikan keamanannya. Sudah seharusnya

setiap negara dari komunitas internasional memiliki kepentingan pribadi yang kuat dalam mengintegrasikan reformasi sektor keamanan ke dalam pencegahan konflik yang lebih luas dan strategi pembangunan negara.

Negara yang aman akan berdampak positif bagi strategi pembangunan negara lainnya, seperti dalam instrumen pembangunan, hukum, sosial, militer dan politik. Selain itu, meskipun alasan utama dari pentingnya peran sektor militer dalam suatu negara berfokus pada alasan keamanan, peningkatan pengeluaran anggaran sektor militer juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dari angkatan kerja melalui penyediaan pendidikan, terutama di negara-negara berkembang di mana industri militer dapat memberikan keterampilan baru bagi warga sumber daya manusianya. Pengeluaran belanja sektor militer memberikan perlindungan kepada warga negara dengan menjaga keamanan internal dan eksternal, sehingga menciptakan iklim perdagangan dan investasi yang positif bagi investor domestik maupun asing.

Ketertinggalan Indonesia dalam mengembangkan sektor persenjataan dan militernya dapat memberikan dampak negatif bagi negara. Di sisi lain, setiap negara di dunia melaksanakan pengembangan sektor militer secara transparan agar negara terus berupaya untuk membuat sistem pertahanan yang dibangun dengan baik dan efisien. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan penyesuaian kekuatan pokok minimum / *Minimum Essential Force*. *Minimum Essential Force* (MEF) adalah kebijakan pembangunan nasional yang ditujukan untuk meningkatkan bidang pertahanan keamanan untuk mengoreksi terhadap faktor perencanaan serta mekanisme penyelenggaraan. Salah satu kegiatan yang ditujukan untuk mencapai penyesuaian *Minimum Essential Force* adalah *Joint Production* pesawat jet

tempur modern *Korean Fighter Xperiment (KFX)* dan *Indonesia Fighter Xperiment (IFX)* (KFX/IFX). *Joint Production military aircraft* ini sudah berlangsung sejak tahun 2009, direncanakan akan selesai pada tahun 2026. Kemandirian Indonesia dalam bidang perindustrian pertahanan menjadi tujuan utama dilaksanakannya kerjasama pertahanan ini. Selain memajukan perindustrian pesawat jet tempur, melalui *joint development project* ini, Indonesia juga bermaksud untuk meningkatkan anggaran pertahanan, serta kuantitas alutsista yang dimilikinya.

Indonesia memilih Korea Selatan untuk menjadi partner dalam *joint development project* karena dalam beberapa tahun terakhir, Korea Selatan telah muncul sebagai pemain penting dalam regional Asia yang berkembang dan tatanan internasional. Ekonomi Korea Selatan adalah salah satu yang paling maju di dunia, dan pengaruhnya telah berkembang dalam berbagai kapasitas yang mencakup bidang-bidang seperti perdagangan, militer, investasi, industri, pariwisata dan budaya Korean Wave. Mengenai keamanan Asia, Korea Selatan memainkan peran penting dalam pengelolaan dan penyelesaian tantangan keamanan yang ditimbulkan oleh Korea Utara. Aliansi Korea Selatan dengan Amerika Serikat berfungsi sebagai sumber penting perdamaian dan stabilitas di Asia.

Selain itu, Korea Selatan memiliki kekuatan militer serta alutsista yang mumpuni, mengingat upaya Korea Selatan untuk membangun “self-defense” (pertahanan diri) selama bertahun-tahun dari ancaman dari Korea Utara. Pada tahun 2007, Korea Selatan menghabiskan 24.5 miliar Dollar Amerika Serikat untuk sektor militer, atau sekitar 2.56% dari PDB negaranya. Data yang berjudul *Military Spending* dalam *Our World in Data* menyatakan bahwa setelah perang dingin, negara-negara di dunia pada umumnya menghabiskan paling tidak sebesar 2% dari PDB untuk sektor militer (Roser & Nagdy, 2016). Korea Selatan melalui *Korea Aerospace*

Industries juga memiliki kemampuan dalam produksi alutsista dengan teknologi modern. Disamping itu, *Korea Aerospace Industries* juga menjadi mitra dari Korea Selatan dalam *Joint Production* pesawat jet tempur modern KFX/IFX. Proyek gabungan kerjasama pertahanan ini secara resmi tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 136 tahun 2014 dengan judul “Program Pengembangan Pesawat Tempur IF-X”.

1.2 Rumusan Masalah

Ditinjau dari latar belakang yang telah tertulis sebelumnya, rumusan masalah yang akan diulas dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana *Joint Development Project KFX/IFX* yang dilakukan oleh Indonesia dan Korea Selatan dalam pemenuhan terhadap *Minimum Essential Force*?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengertian dan deskripsi kepada pembaca mengenai kerjasama antara Indonesia – Korea Selatan melalui kegiatan *Joint Development* dalam proyek pesawat tempur KFX/IFX serta pemenuhannya terhadap *Minimum Essential Force* Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dua jenis manfaat, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Manfaat yang diharapkan dapat diambil setelah membaca penelitian ini antara lain:

Manfaat teoritis:

1. Penelitian ini berguna sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S1 Universitas Sriwijaya.
2. Penelitian ini dapat memperluas wawasan mengenai pemenuhan kebijakan MEF oleh proyek pesawat tempur KFX/IFX.
3. Penelitian ini dapat memperluas wawasan mengenai proyek pesawat tempur KFX/IFX yang dilakukan oleh Indonesia dengan Korea Selatan.
4. Penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan mengenai diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia dengan Korea Selatan, khususnya dalam bidang pertahanan.
5. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber oleh peneliti selanjutnya, untuk dikembangkan menjadi penelitian yang lebih baik lagi.

Manfaat praktis:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan peneliti tentang usaha Indonesia dalam upaya modernisasi Alutsista TNI melalui *Joint Development Project KFX/IFX*.
2. Penelitian ini diharapkan dapat membantu kinerja para pemangku kepentingan dalam mengevaluasi kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dengan Korea Selatan dalam *Joint Development Project KFX/IFX*.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan demi menciptakan kebijakan yang lebih baik lagi di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. (1994). *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ali, A. H. (2021, April 9). *Mengurai Sengkarut Program KFX/IFX antara Korsel & Indonesia*. Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20210405122936-14-235283/mengurai-sengkarut-program-kfx-ifx-antara-korsel-indonesia>
- Ambarwati, Z. N. (2018). *ANALISIS KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA DALAM KERJA SAMA "ENGINEERING AND MANUFACTURING DEVELOPMENT PHASE OF JOINT DEVELOPMENT KF-X/IF-X" DENGAN KOREA SELATAN TAHUN 2014*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Amiri, R. E., Soltani, F., & Naji, S. (2014). Levels of Analysis in International Relations and Regional Security Complex Theory. *Journal of Public Administration and Governance*.
- Aulia, F. (2018, July). *Keberlanjutan Program Pesawat Tempur KFX/IFX dalam Industri Pertahanan Indonesia*. Retrieved from Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI: https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-X-14-II-P3DI-Juli-2018-1947.pdf
- Australia Defence Force. (2019). JOINT MILITARY APPRECIATION PROCESS.
- Bramasta, D. B. (2022, Juni 8). *Mengenal Apa Itu Alutsista, Berikut Daftarnya di TNI AD, AU, dan AL*. Retrieved from KOMPAS: <https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/18/160400765/mengenal-apa-itu-alutsista-berikut-daftarnya-di-tni-ad-au-dan-al?page=all>
- Buzan, B. (1983). *People, States & Fear: an Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*. The Harvester Press.
- Center for Arms Control and Non-Proliferation. (2021). Fact Sheet: F-35 Joint Strike Fighter: Costs and Challenges.
- Defence Hub. (2020). KF21 / IFX Program News and Updates. *General Military Forum*.
- Department of Trade and Industry. (1999). *Manufacturing in the Knowledge Driven Economy*.
- Dougherty, J., & Pfaltzgraff, R. (1971). *Contending Theories of International Relations*. Lippincott.
- Dube, S. C. (1974). *Contemporary India And Its Modernization*. Vikas Publishing House.

- Echevarria, A. (2017). *Military Strategy: A Very Short Introduction*.
- FAS Intelligence Resource Program. (2022). *Presidential Security Service (PSS)*.
- Forbes. (2022). Lockheed Martin (LMT).
- Gardner Innovation Search Partner. (2022). *What is Technology Transfer?* Retrieved from <https://gardnerisp.com/what-is-technology-transfer/>
- Hanekom, S. X. (1987). *Public Policy: Framework and Instrument for Action*. Johannesburg: Macmillan.
- Higuera, J. (2021). *Colombia chooses South Korea's TA-50, FA-50 as next jet trainers, officials say*. Retrieved from Defense News.
- Hirnissa, M., Habibullah, M. S., & Baharom, A. (2009, June). *Military Expenditure and Economic Growth in Asean-5 Countries*. Retrieved from Researchgate: https://www.researchgate.net/publication/41892477_Military_Expenditure_and_Economic_Growth_in_Asean-5_Countries
- Islamy, M. I. (2002). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*.
- JDIH BPK RI. (1983, November 15). *Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pembentukan Dewan Pembina Dan Pengelola Industri-Industri Strategis Dan Industri Hankam*. Retrieved from Database Peraturan JDIH BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/65603/keppres-no-59-tahun-1983>
- Kanikira, S. (2018). *Air Power in the 21st Century: Enduring Trends and Uncertain Futures*. Air Power Development Centre.
- KBBI. (2021). Retrieved from <https://kbbi.web.id/implikasi>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2021). *Profil Negara dan Hubungan Bilateral*. Jakarta.
- Kementerian Pertahanan Indonesia. (2010). *PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2010 TENTANG KEBIJAKAN UMUM PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2010-2014*. Retrieved from Kemhan.go.id: <https://www.kemhan.go.id/strahan/wp-content/uploads/migrasi//Produk/PERPRES%2041%20TAHUN%202010%20TENTANG%20KEBIJAKAN%20UMUM%20PERTAHANAN%20NEGARA%20TAHUN%202010-2014.pdf>

- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014*. Jakarta.
- KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA. (2014, March 12). *Presiden SBY Saksikan Gelar Alat Utama Sistem Persenjataan TNI AL*. Retrieved from https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_sby_saksikan_gelar_alat_utama_sistem_persenjataan_tni_al
- Keohane, R. (2001). *Realism, Neorealism and the Study of World Politics*.
- Korea Institute of Defense Analyses. (2022). *The Korean Journal of Defense Analysis*. Retrieved from <https://www.kida.re.kr/index.do?lang=en>
- Lall, S. (1992). *Technological Capabilities and Industrialization*.
- Leonardo Airborne & Space Systems. (2017). *ACTIVE ELECTRONICALLY SCANNED ARRAY (AESA) FIRE CONTROL RADAR*.
- LIPI. (2013). *Kajian Kebijakan Alutsista Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia*. Jakarta: Penerbit Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Retrieved from Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia: <http://penerbit.lipi.go.id/data/naskah1424743621.pdf>
- Lockheed Martin. (2022). About Lockheed Martin.
- Machiavelli, N. (1532). *The Prince*. Antonio Blado d'Asola.
- Maharani, C., & Yuniorrta, S. (2018, July 4). *Should Indonesia Continue KFX/IFX Program?* Retrieved from The Jakarta Post: <https://www.thejakartapost.com/academia/2018/07/04/should-indonesia-continue-kfxifx-program.html>
- Meiser, J. (2021). *What Good Is Military Strategy? An Analysis of Strategy and Effectiveness*.
- Moştofleu, C., & Duşu, P. (2004). *Collective Defence and National Defence*. Bucharest: "Carol I" National Defense University Publishing House.
- Morgenthau, H. J. (1951). *In Defense of The National Interest*. The University of Chicago Press.
- Morgenthau, H. J. (1962). *The Impasse of American Foreign Policy*. University of Chicago Press.
- Morgenthau, H. J. (1968). *Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace*. Alfred A Knopf.
- Mukhtar, S. (2017). *Keamanan Nasional: Antara Teori dan Prakteknya di Indonesia*. *Sociae Polites*.

- Nasir, M. (1993). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Rosda Karya.
- Nation Master. (2016). *Combat aircraft: Countries Compared*.
- Pawar, N. (2020). *Research Methodology (An Overview)*. KD Publications.
- Pearson, F. (1989). The Correlates of Arms Importation. *Journal of Peace Research*.
- Pratiwi, I. (2021). *PT. Dirgantara Indonesia Siapkan Personil untuk Kerjasama KFX*. Retrieved from Republika: <https://www.republika.co.id/berita/o0lq1g317/pt-dirgantara-indonesia-siapkan-personil-untuk-kerjasama-kfx>
- Purwanto, A. (2020, October 4). *Industri Pertahanan: Sejarah, Perkembangan, dan Tantangan*. Retrieved from Kompas Pedia: <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/industri-pertahanan-sejarah-perkembangan-dan-tantangan>
- Rika, H. (2022). *Kemhan Ungkap Jumlah Pesawat Tempur Indonesia, Mayoritas 20 Tahun Baca artikel CNN Indonesia "Kemhan Ungkap Jumlah Pesawat Tempur Indonesia, Mayoritas 20 Tahun*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220218090505-20-760803/kemhan-ungkap-jumlah-pesawat-tempur-indonesia-mayoritas-20-tahun>
- Rinakit, S. (2005). The Indonesian Military After the New Order. *Institute of Southeast Asian Studies*.
- Ririhena, Y. (2014, October 2). *RI, South Korea to reach deal on phase II of KFX/ IFX fighter jet*. Retrieved from The Jakarta Post: <https://www.thejakartapost.com/news/2014/10/02/ri-south-korea-reach-deal-phase-ii-kfx-ifx-fighter-jet.html>
- Rongzhi, Z., & Kaizhong, Y. (2020). Space object detection technology. *Science Direct*.
- Roser, M., & Nagdy, M. (2016). Military Spending. *Our World in Data*.
- RSIS Policy Report. (2014). Indonesia's Emerging Defence Economy: The Defence Industry Law and Its Implications.
- Sari, M. I. (2021, August 13'). *Encouraging the Renegotiation Process between Indonesia and South Korea for the Continuation of the KFX/IFX Jet Fighter Cooperation Project*. Retrieved from THC INSIGHTS: <https://www.habibiecenter.or.id/img/publication/ce2e674cd9ce4557ec46e4f2bfbfd1058.pdf>

- Septiari, D. (2020, January 22). *South Korea rolls out first KFX jet prototype. Will Indonesia still reap benefits from it?* Retrieved from Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea: <https://www.indonesia-koreajournalist.net>
- Siagian, Perwita, A. A., Eko, R., Ali, Y., Fitriati, R., & Pramono Budi. (2021). The Concept of Indonesian National Security System in Facing 21st Century Strategic Environment Dynamics. *Review of International Geographical Education*.
- Stein, A. (1990). *Why Nations Cooperate: Circumstance and Choice in International Relations*. Cornell University Press.
- Stockholm International Peace Research Institute. (2008). Military Expenditure Database.
- Tentara Nasional Indonesia. (2022). *Peran, Fungsi dan Tugas Tentara Nasional Indonesia*. Retrieved from <https://tni.mil.id/pages-2-peran-fungsi-dan-tugas.html>
- UK Essays. (2021, August 5). *Criticism of Realism Theory in International Relations*. Retrieved from ukessays.com: <https://www.ukessays.com/essays/politics/a-criticism-of-realism-theory-of-international-politics-politics-essay.php>
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. (2002).
- Vavasseur, X. (2020). *South Korea To Double Down On F-35 And Procure STOVL Variant For LPX-II*. Retrieved from Naval News: <https://www.navalnews.com/naval-news/2020/09/south-korea-to-double-down-on-f-35-and-procure-stovl-variant-for-lpx-ii/>
- Waltz, K. (1959). *Man, the State, and War: A Theoretical Analysis*. Columbia University Press.
- Waltz, K. (1979). *Theory of International Politics*. Addison-Wesley Publishing Company.
- Waltz, K. (1981). The Spread of Nuclear Weapons: More May Better. *Adelphi Papers*.
- World Directory of Modern Military Aircraft. (2010). Indonesian Air Force.
- Yahya, A. N. (2021, March 17). *Menilik Spesifikasi Kapal Selam Alugoro-405 Buatan PAL dan DSME Korsel Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menilik Spesifikasi Kapal Selam Alugoro-405 Buatan PAL dan DSME Korsel"*. Retrieved from KOMPAS: <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/17/15302071/menilik-spesifikasi-kapal-selam-alugoro-405-buatan-pal-dan-dsme-korsel?page=all>
- Yonhap. (2021, February 9). *Negotiations under way with Indonesia over fighter jet project: official*. Retrieved from The Korea Herald: <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20210209000905>

